

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1.1 Sejarah Berdirinya Bondowoso

Sejarah singkat berdirinya kota Bondowoso dimulai ketika pada tahun 1789, Raden Bagus Assra yang saat itu menjabat sebagai Mentri Anom di Besuki dengan nama Mas Abhiseka Mas Astruno ditugaskan untuk memperluas wilayah kekuasaan Besuki ke arah selatan. Dalam usaha memperluas wilayah tersebut pada tahun 1794, beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dan beliau diangkat menjadi Demang di daerah yang baru itu dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno.

Pada tahun 1819, Adipati Besuki Raden Ario Adipati Prawiroadingrat meningkatkan status Bondowoso dari kademangan menjadi wilayah lepas dari Besuki dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar Mas Ngabehi Kertonegoro, serta dengan predikat Ronggo I. Hal ini berlangsung pada hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H atau 17 Agustus 1819 ditandai dengan penyerahan Tombak Tunggul Wulung. Peristiwa itu kemudian dijadikan eksistensi formal Bondowoso sebagai wilayah kekuasaan mandiri di bawah otoritas kekuasaan Kiai Ronggo Bondowoso.

Eksistensi Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah administrasi dan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara legal formal ditetapkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tanggal 2 Pebruari 1950.

1.1.1.2 Visi dan Misi

A. Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, Berdaya Dan Bermartabat”

- 1. Terwujudnya;** terkandung makna upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat.
- 2. Masyarakat Bondowoso;** seluruh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- 3. Beriman;** adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang secara khidmat dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu serta hubungan yang harmonis dan toleran antar umat beragama.
- 4. Berdaya;** kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan baik tenaga maupun olah pikir untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki keunggulan-keunggulan sehingga mampu untuk bersaing dalam segala bidang.
- 5. Bermartabat;** kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki derajat kehidupan yang tinggi dengan kata lain diharapkan tercipta masyarakat sejahtera (makmur, aman, tentram) yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

B. MISI

Guna mendukung dan merealisasikan visi yang telah dibuat, ditetapkan juga misi-misi Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
4. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang responsif, efisien, efektif dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum.

1.1.1.3 Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah didukung dengan sumber daya yang ada antara lain aset-aset daerah, pendapatan daerah dan sumber daya aparatur. Pada tahun 2013, pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso mencapai Rp. 1.266.838.813.992,13 yang digunakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai. Jumlah pegawai Pemerintah

Kabupaten Bondowoso saat ini sebanyak 10.579 orang terdiri dari 10.342 orang berstatus PNS dan 237 orang berstatus tenaga kontrak, dengan kualifikasi pendidikan pegawai sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kualifikasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bondowoso

No	Kualifikasi Pegawai	Jumlah Personil (Orang)	
		PNS	Kontrak
I	Berdasarkan Pendidikan		
1	SD	316	114
2	SMP/MTs	453	22
3	SMA/ SMK/ MA	2877	53
4	D-1	26	2
5	D-2	1.320	-
6	D-3	695	17
7	D-4	29	-
8	S-1	4.286	15
9	S-2	338	14
10	S-3	2	-
	Jumlah	10.342	237
II	Berdasarkan Golongan		
1	Golongan Ia	23	-
2	Golongan Ib	273	-
3	Golongan Ic	73	-
4	Golongan Id	285	-
5	Golongan Iia	313	-
6	Golongan Iib	1878	-
7	Golongan Iic	584	-
8	Golongan Iid	345	-
9	Golongan IIIa	813	-
10	Golongan IIIb	1151	-

No	Kualifikasi Pegawai	Jumlah Personil (Orang)	
		PNS	Kontrak
11	Golongan IIIc	849	-
12	Golongan III d	744	-
13	Golongan Iva	2415	-
14	Golongan Ivb	555	-
15	Golongan Ivc	38	-
16	Golongan Ivd	3	-
	Jumlah	10.342	-

Sumber : BKD Kabupaten Bondowoso, 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah pada tahun 2008 melakukan penataan kelembagaan, seiring dengan perkembangan, maka pada tahun 2010 dilakukan evaluasi kelembagaan untuk mengefisiensi dan mengefektifkan lembaga yang ada, sehingga pada awal tahun 2011 Sumberdaya organisasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso meliputi 1 sekretariat daerah (3 asisten, 8 bagian) 1 sekretariat DPRD (3 bagian), 5 staf ahli bupati, 13 dinas, 10 lembaga teknis daerah, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1 BUMD, 23 kecamatan dan 10 kelurahan.

Tabel 4.2

Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah, yang terdiri dari :	Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	
	1). Bagian Pemerintahan	
	2). Bagian Hukum	
	3). Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengolahan Data Elektronik	
	b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :	
	1). Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan	
	2). Bagian Perekonomian	
	c. Asisten Administrasi Umum :	
	1). Bagian Umum dan Protokol	
	2). Bagian Organisasi	
	3). Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	
2	Sekretariat DPRD	
	a. Bagian Umum	
	b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
	c. Bagian Keuangan	
3	Staf Ahli Bupati	
	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	
	b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	
	c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia	
	d. Staf Ahli Bidang Pertanian	
	e. Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Agama	
4	Lembaga Teknis Daerah	Perda No 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
	a. Inspektorat Kabupaten Bondowoso	
	b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso	
	d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso	
	e. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso	
	f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso	
	g. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso	
	h. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	
	i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso	

	j. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso	
5	Dinas Daerah	
	a. Dinas Pendidikan	Perda No 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
	b. Dinas Kesehatan	
	c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	d. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan	
	e. Dinas Sosial	
	f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
	h. Dinas Pertanian	
	i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	j. Dinas Peternakan dan Perikanan	
	k. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
	l. Dinas Pengairan	
	m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 14 Tahun 2010
7	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso	Perda No. 5 Tahun 2008
8	Kecamatan	
	a. Kecamatan Bondowoso	Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
	b. Kecamatan Curahdami	
	c. Kecamatan Tegalampel	
	d. Kecamatan Tenggarang	
	e. Kecamatan Wringin	
	f. Kecamatan Pakem	
	g. Kecamatan Binakal	
	h. Kecamatan Taman Krocok	
	i. Kecamatan Tamanan	
	j. Kecamatan Maesan	
	k. Kecamatan Grujugan	
	l. Kecamatan Pujer	
	m. Kecamatan Jambesari Darus Sholah	
	n. Kecamatan Wonosari	
	o. Kecamatan Sukosari	
	p. Kecamatan Tlogosari	
	q. Kecamatan Sumberwringin	
	r. Kecamatan Prajekan	
	s. Kecamatan Tapen	
	t. Kecamatan Klabang	
	u. Kecamatan Cermee	
	v. Kecamatan Sempol	
	w. Kecamatan Botolinggo	
9	Kelurahan	

a.	Kelurahan Curahdami	Perda No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
b.	Kelurahan Tamansari	
c.	Kelurahan Kademangan	
d.	Kelurahan Dabasah	
e.	Kelurahan Badean	
f.	Kelurahan Kotakulon	
g.	Kelurahan Blindungan	
h.	Kelurahan Nangkaan	
i.	Kelurahan Tenggarang	
j.	Kelurahan Sekarputih	

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Daerah Bondowoso. Penelitian ini akan melihat kinerja dari aparatur pemerintah daerah Bondowoso. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuisisioner yang diberikan kepada aparatur pemerintah di setiap instansi dibawah naungan pemerintah daerah Bondowoso yaitu terdiri dari 30 instansi. Setiap instansi dipilih 3 orang yang akan diberikan kuisisioner diantaranya 1 orang Kabid / Kepala unit, 2 orang pegawai secara acak.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah (Y).

4.1.3 Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan untuk membuktikan hipotesis yang ada pada penelitian ini dilakukan beberapa metode analisis data. Hasil dari metode analisis data akan diuraikan di bawah ini :

4.1.3.1 Gambaran Umum Pesponden

Responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 90 orang. Dimana pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso terdapat 3 orang yang dijadikan responden data diolah dengan jumlah instansi sebanyak 30 sedangkan untuk kuesioner yang disebarakan sebanyak 118 dengan alasan mengantisipasi tingkat pengembalian yang tidak mencapai kouta.

Tabel 3.3
Sampel dan Responden

No	Nama Instansi/lembaga	Kuesioner yang didistribusikan	Kuesioner yang diterima kembali	Kuesioner yang diolah
1	Bagian Hukum	4	3	3
2	Bagian perekonomian	4	4	3
3	Bagian administrasi pembangunan dan keuangan	4	4	3
4	Bagian umum dan protocol	4	4	3
5	Bagian perlengkapan	4	4	3
6	Bagian pemerintahan	4	4	3
7	Bagian organisasi	4	4	3
8	Bagian humas dan PDE.	4	4	3
9	Dinas bina marga dan cipta karya	4	4	3
10	Dinas kehutanan dan perkebunan	4	4	3
11	Dinas kesehatan	3	3	3
12	Dinas koprasi, perindustrian dan perdagangan	4	4	3
13	Dinas pariwisata, pemuda, olahraga dan perhubungan	4	4	3
14	Dinas pendapatan dan keuangan	4	4	3
15	Dinas pendidikan	4	4	3
16	Dinas pengairan	4	4	3
17	Dinas social dan kesejahteraan	4	4	3
18	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	4	4	3
19	Dinas kepedudukan dan catatan sipil	4	4	3
20	Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	4	3	3
21	Badan kepegawaian daerah	4	4	3

22	Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	3	3	3
23	Badan lingkungan hidup	4	4	3
24	Badan pemberdayaan masyarakat	4	4	3
25	Badan perencanaan pembangunan daerah.	4	3	3
26	Kantor inspektorat	4	4	3
27	Kantor pelayanan, perijinan terpadu	4	4	3
28	Kantor perpustakaan dan arsip	4	4	3
29	Kantor satuan polisi pamung praja	4	4	3
30	Kantor ketahanan pangan.	4	4	3
TOTAL		118	114	90

Dari seluruh kuesioner kuesioner yang telah didistribusikan sejumlah 118 kuesioner, kuesioner yang berhasil diterima kembali sejumlah 114 kuesioner, dan yang digunakan untuk keperluan pengolahan data adalah sejumlah 90 kuesioner, sedangkan sisanya sebanyak 24 kuesioner tidak diolah karena menyesuaikan dengan metode yang telah ditentukan. Data untuk masing-masing Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso disajikan dalam Tabel 4.3 Tingkat respon dalam pengisian kuesioner di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso cukup tinggi, hal ini dirasakan oleh peneliti karena keterbukaan mereka terhadap kebutuhan informasi oleh pihak luar dan kesadaran mereka terhadap kebutuhan hasil penelitian bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyajian data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri responden. Sedangkan prosedurnya dengan menyebarkan kuesioner dan meminta untuk mengisi kuisisioner. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan berikut :

Tabel 4.4

Diskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Nama lembaga	Pendidikan terakhir				
	SLTA	D3	S1	S2	S3
Bagian	3	1	16	4	
Badan	7		8	3	
Dinas	2	1	18	11	1
Kantor	4	1	9	1	

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwasannya mayoritas responden berpendidikan Strata-1 dengan jumlah 51 responden dan Strata-2 dengan jumlah 20 orang, hal ini menunjukkan secara akademi responden memiliki pengetahuan yang luas dalam merencanakan dan memutuskan anggaran.

4.1.3.2 Analisis Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Analisis Uji Instrumen yang dilakukan adalah menggunakan instrument kuesioner. Desain tersebut akan mengadakan pengukuran dari variabel. Dengan menggunakan uji validitas dan uji reliable. Uji validitas mendeteksi sejauh mana kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang ingin diukur sedangkan Uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsistensi apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama. Tujuan Uji validitas dan Uji reliabilitas adalah meyakinkan bahwa baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid.

Menurut sugiyono dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:169), adapun suatu instrument dasar pengambilan keputusan suatu item *valid* atau tidak *valid*, dapat diketahui dengan cara menjumlah Skor butir dan Skor total (skor butir + skor total), bila hasil penjumlahan tersebut di atas 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa

butir instrumen tersebut *valid* sebaliknya bila korelasi r dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak *valid* sehingga harus diperbaiki atau di buang

Menurut Arikunto dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:170) Apabila variabel yang diteliti mempunyai *Cronbach's Alpha* (α) > 60 % (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliabel sebaliknya *cronbach's alpha* (α) < 60 % (0,60) maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel dapat dielaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran (X₁)

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
X ₁	X _{1.1}	0,681	0,674	Valid dan Reliabel
	X _{1.2}	0,759		Valid dan Reliabel
	X _{1.3}	0,570		Valid dan Reliabel
	X _{1.4}	0,554		Valid dan Reliabel
	X _{1.5}	0,592		Valid dan Reliabel
	X _{1.6}	0,705		Valid dan Reliabel
	X _{1.7}	0,655		Valid dan Reliabel
	X _{1.8}	0,483		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kejelasan Tujuan Anggaran (X₂)

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
X ₂	X _{2.1}	0,563	0,678	Valid dan Reliabel
	X _{2.2}	0,572		Valid dan Reliabel
	X _{2.3}	0,504		Valid dan Reliabel
	X _{2.4}	0,532		Valid dan Reliabel
	X _{2.5}	0,499		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Evaluasi Anggaran (X₃)

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
X ₃	X _{3.1}	0,542	0,772	Valid dan Reliabel
	X _{3.2}	0,548		Valid dan Reliabel
	X _{3.3}	0,623		Valid dan Reliabel
	X _{3.4}	0,650		Valid dan Reliabel
	X _{3.5}	0,699		Valid dan Reliabel
	X _{3.6}	0,767		Valid dan Reliabel
	X _{3.7}	0,695		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Umpan Balik Anggaran (X₄)

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
X ₄	X _{4.1}	0,631	0,635	Valid dan Reliabel
	X _{4.2}	0,751		Valid dan Reliabel
	X _{4.3}	0,658		Valid dan Reliabel
	X _{4.4}	0,462		Valid dan Reliabel
	X _{4.5}	0,575		Valid dan Reliabel
	X _{4.6}	0,517		Valid dan Reliabel
	X _{4.7}	0,364		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tingkat Kesulitan Pencapaian Anggaran (X₅)

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
X ₅	X _{5.1}	0,744	0,694	Valid dan Reliabel
	X _{5.2}	0,470		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Tabel 4.10**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)**

Indikator	Nomer Item	Validitas	Koefisien Alpha	Keterangan
		Korelasi (r)		
Y	Y ₁	0,369	0,732	Valid dan Reliabel
	Y ₂	0,320		Valid dan Reliabel
	Y ₃	0,317		Valid dan Reliabel
	Y ₄	0,561		Valid dan Reliabel
	Y ₅	0,491		Valid dan Reliabel
	Y ₆	0,570		Valid dan Reliabel
	Y ₇	0,345		Valid dan Reliabel
	Y ₈	0,423		Valid dan Reliabel
	Y ₉	0,440		Valid dan Reliabel
	Y ₁₀	0,561		Valid dan Reliabel
	Y ₁₁	0,324		Valid dan Reliabel
	Y ₁₂	0,540		Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dijelaskan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa semua instrument valid dan reliable. Hasil korelasi r menunjukkan semua instrumen lebih besar dari 0,30, dan pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrumen lebih besar dari 0,60.

4.1.3.3 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data dalam bentuk nilai minimum, maximum, mean (rata-rata) dan standart deviasi. Hasil pengujian statistic deskriptif akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.11**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PARTISIPASI ANGGARAN	90	1	5	3.904	4.537

KEJELASAN	TUJUAN	90	1	5	3.656	1.780
ANGGARAN						
EVALUASI ANGGARAN		90	1	5	3.367	4.935
UMPAN BALIK ANGGARAN		90	1	5	3.003	3.887
TINGKAT	KESULITAN					
PENCAPAIAN	TUJUAN	90	1	5	4.233	1.458
ANGGARAN						
KINERJA	APARATUR	90	1	5	4.102	4.194
PEMERINTAH DAERAH						
Valid N (listwise)		90				

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Variabel partisipasi anggaran, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 3,904. Hal ini kebanyakan responden memberikan pernyataan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini, artinya bahwa responden di Kabupaten Bondowoso setuju atau mendukung dengan adanya partisipasi anggaran dalam penetapan anggaran.

Variabel kejelasan tujuan anggaran, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 3,656. Hal ini kebanyakan responden memberikan pernyataan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini, artinya bahwa responden di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa tingkat kejelasan atas tujuan dari anggaran cukup tinggi. Dimana kejelasan atas tujuan RKA-SKPD yang membingungkan aparaturnya pelaksana Pemerintah daerah cukup sedikit /kecil.

Variabel evaluasi anggaran, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 3,367. Hal ini kebanyakan responden memberikan pertanyaan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini, artinya bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan oleh manajemen Pemerintah daerah cukup tinggi. Dimana pertanggungjawaban atas penyimpangan anggaran dalam Unit adalah tanggung jawab aparatur Pemerintah daerah sendiri.

Variabel umpan balik anggaran, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 3,003. Hal ini kebanyakan responden memberikan pernyataan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini, artinya bahwa tingkat umpan balik yang diterima oleh para aparatur Pemerintah daerah cukup tinggi. Dimana umpan balik dan evaluasi tentang kerja pada akhir siklus/daur penyusunan rencana anggaran dan pemanfaatan umpan balik pada akhir siklus penyusunan rencana anggaran, dapat digunakan dalam praktek.

Variabel kesulitan tujuan anggaran, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 4,223. Hal ini kebanyakan responden memberikan pernyataan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini, artinya bahwa tingkat kejelasan atas tujuan dari anggaran cukup tinggi. Dimana kejelasan atas tujuan RKA-SKPD yang membingungkan aparatur pelaksana Pemerintah daerah cukup sedikit /kecil dan kesadaran atas pentingnya tujuan RKA-SKPD perlu adanya prioritas.

Variabel kinerja aparatur pemda, jawaban responden menunjukkan angka mean sebesar 4,102. Hal ini kebanyakan responden memberikan pernyataan antara ragu-ragu sampai dengan setuju pada setiap pertanyaan dalam kuesioner ini,

artinya bahwa aparaturnya Pemerintah daerah sudah merasa kinerja mereka cukup baik.

4.1.3.4 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Non-Multikolinearitas

Menurut Singgih Santoso dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:176) bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar peubah bebas (variabel independen). Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem *multikolinearitas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara peubah bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*varians inflaction factor*). Pedoman suatu model yang bebas multikolinearitas yaitu nilai $VIF \leq 4$ atau 5. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk masing - masing peubah seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.12

Hasil Uji Asumsi Non-Multikolonieritas

Variabel bebas	VIF	Keterangan
Partisipasi Anggaran (X_1)	1.347	Non-Multikolonieritas
Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2)	1.285	Non-Multikolonieritas
Evaluasi Anggaran (X_3)	1.287	Non-Multikolonieritas
Umpan Balik Anggaran (X_4)	1.110	Non-Multikolonieritas
Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5)	1.136	Non-Multikolonieritas

Sumber: Data primer (diolah), 2013

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 4 atau 5. Sehingga dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinieritas.

B. Uji Non-Autokorelasi

Menurut Ghozali dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:177) tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahannya pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi *autokorelasi*. Model regresi yang baik adalah bebas dari *autokorelasi*.

Menurut Singgih dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:178) untuk mendeteksi ada tidaknya *autokorelasi*, melalui metode table Durbin-Watson yang dapat dilakukan melalui program SPSS, di mana secara umum dapat diambil patokan yaitu:

- a. Jika angka D-W di bawah -2 , berarti *autokorelasi* positif.
- b. Jika angka D-W di atas $+2$, berarti *autokorelasi* negatif.
- c. Jika angka D-W antara -2 , sampai dengan $+2$, berarti tidak ada *autokorelasi*.

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai DW senilai 1.697. Berdasarkan hasil yang ada maka asumsi tidak terjadinya *autokorelasi* terpenuhi karena nilai DW menunjukkan berada di antara -2 sampai $+2$.

C. Uji Heteroskedstisitas

Menurut Mudrajad dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:178), *heteroskedastisitas* muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu *observasi* lain, artinya setiap *observasi* mempunyai *reliabilitas* yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung *Heteroskedastisitas* dan sebaliknya *Homoskedastisitas*. Hasil uji Heteroskedastisitas ditunjukkan sebagai tabel berikut.

Tabel 4.13
Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Variabel bebas	R	Sig	Keterangan
Partisipasi Anggaran (X ₁)	0.054	0.615	Homoskedastisitas
Kejelasan Tujuan Anggaran (X ₂)	0.067	0.533	Homoskedastisitas
Evaluasi Anggaran (X ₃)	0.002	0.982	Homoskedastisitas
Umpan Balik Anggaran (X ₄)	-0.079	0.460	Homoskedastisitas
Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X ₅)	0.057	0.595	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Dari hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung *Heteroskedastisitas* melainkan *Homoskedastisitas*. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan kesalahan (residual) semakin besar pula.

D. Uji Normalitas

Menurut Santoso dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:178) pengujian dalam sebuah model regresi, variabel *dependent*, variabel *independent* atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Sedangkan menurut Sulhan (2011:24) metode yang digunakan menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Kolmogorow-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorow-Smirnov (K-S) > 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil ditunjukkan sebagai tabel berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Asumsi Normalitas

		Unstandardi zed Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.92978679
Most Extreme Differences	Extreme Absolute	.036
	Positive	.030
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.343
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

	Unstandardi zed Residual
N	90
Normal Parameters ^a	
Mean	.0000000
Std. Deviation	3.92978679
Most Extreme Absolute Differences	.036
Positive	.030
Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z	.343
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
a. Test distribution is Normal.	

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Hasil pengujian Output pada tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi sebesar $1.000 > 0,05$. Maka asumsi dengan keseluruhan variabel, normalitas terpenuhi.

4.1.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Asnawi dan Masyhuri (2011:182) pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15**Hasil Analisis Koefisien Regresi**

Variabel bebas	B	Srd Error	Sig
Constan	2.933	3.886	0.000
Partisipasi Anggaran (X ₁)	0.411	0.110	0.003
Kejelasan Tujuan Anggaran (X ₂)	0.534	0.273	0.000
Evaluasi Anggaran (X ₃)	0.268	0.098	0.005
Umpan Balik Anggaran (X ₄)	0.421	0.116	0.003
Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X ₅)	0.334	0.314	0.003

Sumber: Data primer (diolah), 2014.

Dari hasil tabel 4.10 Tabel koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien dalam persamaan regresi linier berganda. Nilai persamaan yang dipakai adalah yang berada pada kolom B (koefisien). Standart persamaan regresi linear berganda adalah dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 2,933 + 0,411(X_1) + 0,534(X_2) + 0,268(X_3) + 0,421(X_4) + 0,334(X_5)$$

Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel Partisipasi Anggaran (X₁), Kejelasan Tujuan Anggaran (X₂), Evaluasi Anggaran (X₃), Umpan Balik Anggaran (X₄), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X₅) berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Y)

secara linear. Berdasarkan diatas maka Pengaruh tersebut terlihat dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

1. $a = 2,933$

Konstanta (a) sebesar 2,933 artinya jika variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) bernilai 0, maka tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) cenderung ada variabel lain yang mempengaruhinya.

2. $b_1 = 0,411$

Nilai b_1 sebesar 0,411 artinya jika variabel Partisipasi Anggaran (X_1) mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel terikat yang dalam hal ini adalah variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) akan meningkat atau mengalami perubahan sebesar 0,411.

3. $b_2 = 0,534$

Nilai b_2 sebesar 1,036 artinya jika variabel Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2) mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel terikat yang dalam hal ini adalah variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) akan meningkat atau mengalami perubahan sebesar 0,534.

4. $b_3 = 0,268$

Nilai b_3 sebesar 3,117 artinya jika variabel Evaluasi Anggaran (X_3) mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel terikat yang dalam hal ini adalah variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) akan meningkat atau mengalami perubahan sebesar 0,268.

5. $B_4 = 0,421$

Nilai b_4 sebesar 0,421 artinya jika variabel Umpan Balik Anggaran (X_4) mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel terikat yang dalam hal ini adalah variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) akan meningkat atau mengalami perubahan sebesar 0,421.

6. $B_5 = 0,334$

Nilai b_5 sebesar 0,334 artinya jika variabel Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel terikat yang dalam hal ini adalah variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) akan meningkat atau mengalami perubahan sebesar 0,334.

4.1.3.6 Pengujian Hipotesis

4.1.3.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil menunjukkan sebagai tabel berikut.

Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 dan nilai F_{hitung} sebesar 5,339. Dengan demikian maka nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai probabilitas signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,005 < 0,05$. Selain itu juga nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} yaitu $5,339 > 2,32$. Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama

variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), dan Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

4.1.3.6.2 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji T) digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh indikator-indikator Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Y). Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan juga dilakukan dengan menggunakan perbandingan nilai T_{hitung} dengan T_{tabel} , apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima, dan apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_5 ditolak. Hasil uji simultan dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.16

Hasil Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji T)

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig t	alpa
X_1	2,179	1,984	,003	0,05
X_2	3,958	1,984	,000	0,05
X_3	2,712	1,984	,005	0,05

X ₄	2,095	1,984	,003	0,05
X ₅	2,427	1,984	,003	0,05

Sumber: Data primer (diolah), 2014

Hasil dari output uji parsial (uji T) pada tabel 4,14 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji T pada Partisipasi Anggaran (X₁)

Uji T terhadap Partisipasi Anggaran (X₁) didapatkan T_{hitung} sebesar 2,179 dengan signifikansi t sebesar 0,003, Karena T_{hitung} > T_{tabel} (2,179 > 1,984) atau signifikansi T lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05), maka secara parsial indikator Partisipasi Anggaran (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

b. Uji T pada Kejelasan Tujuan Anggaran (X₂)

Uji T terhadap Kejelasan Tujuan Anggaran (X₂) didapatkan T_{hitung} sebesar 3,958 dengan signifikansi T sebesar 0,000, Karena T_{hitung} > T_{tabel} (3,958 > 1,984) atau signifikansi T lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka secara parsial indikator Kejelasan Tujuan Anggaran (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

c. Uji T pada Evaluasi Anggaran (X₃)

Uji T terhadap Evaluasi Anggaran (X₃) didapatkan T_{hitung} sebesar 2,712 dengan signifikansi T sebesar 0,005, Karena T_{hitung} > T_{tabel} (2,712 > 1,984) atau signifikansi T lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05), maka secara parsial indikator Evaluasi Anggaran (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

d. Uji T pada Umpan Balik Anggaran (X_4)

Uji T terhadap Umpan Balik Anggaran (X_4) didapatkan T_{hitung} sebesar 2,095 dengan signifikansi T sebesar 0,003, Karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,095 > 1,984$) atau signifikansi T lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka secara parsial indikator Umpan Balik Anggaran (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

e. Uji T pada Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5)

Uji T terhadap Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) didapatkan T_{hitung} sebesar 2,427 dengan signifikansi T sebesar 0,003, Karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,427 > 1,984$) atau signifikansi T lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka secara parsial indikator Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan uraian dan output uji T maka dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), dan Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) secara parsial,

4.1.3.6.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya, Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R square*,

Tabel 4,17

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.622	.670	3.045

Sumber: Data Primer (diolah), 2014

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4,15 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang diperoleh sebesar 0,670, Hal ini berarti 67% tingkat Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), dan Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5), sedangkan sisanya yaitu 33%, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh pada variabel Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial,

4.2.1 Secara Simultan

Berdasarkan uji F, peneliti berhasil membuktikan bahwasannya terdapat pengaruh secara bersama-sama pada Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan

Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), dan Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) Kabupaten Bondowoso. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 (H_6) diterima yaitu Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah, Selain itu juga dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai R^2 karakteristik tujuan anggaran berpengaruh sebesar 67% terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiyani (2009) dan Ramandei (2009). Pada penelitiannya mengungkapkan hasil temuannya secara bersama-sama karakteristik tujuan anggaran yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten temanggung kecuali evaluasi anggaran yang tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten Temanggung.

4.2.2 Secara Parsial

Berdasarkan uji T, peneliti berhasil membuktikan bahwasannya terdapat hubungan disetiap variabel bebas yang Partisipasi Anggaran (X_1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2), Evaluasi Anggaran (X_3), Umpan Balik Anggaran (X_4), Tingkat Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran (X_5) terhadap variabel terikat kinerja aparatur pemerintah daerah (Y) secara parsial,

A. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja aparatur Pemda, ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparatur Pemerintah daerah dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkatkan kinerja aparatur Pemda, sebaliknya jika partisipasi aparatur Pemerintah daerah dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja aparatur Pemerintah daerah juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis **H1** dalam penelitian ini diterima yaitu partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Munawar (2006), yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kab. Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparatur pemerintah daerah adalah spesifik dan jelas, sehingga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Secara aplikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memenuhi prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Bondowoso melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh mahasiswa dan lain-lain sebagai obyek netral dan memberikan saran terkait Rencana Kerja Anggaran yang menjadi prioritas untuk pembangunan daerah dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

B. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap

variabel kinerja aparatur Pemda, ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparatur Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparatur Pemerintah daerah juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis **H2** dalam penelitian ini diterima yaitu kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2012). Pada penelitiannya tersebut, didapatkan hasil bahwa Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil temuan ini semakin mendukung penelitian Locke dan Schweiger (1979) dalam Istiyani (2009) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana, yang berakibat pada penurunan kinerja. Beberapa penelitian mendukung pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kinerja manajerial (Ivancevich, 1976; Steers, 1975; Imoisili, 1989). Manajer yang bekerja tanpa tujuan yang jelas akan dihadapkan pada tingginya ketidakpastian atas pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Secara aplikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memenuhi prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparansi dan akuntabilitas anggaran, Pemerintah Daerah menginformasikan setiap agenda atau program kerja yang akan dilaksanakan melalui Website dan papan informasi yang berada di alun-alun Kabupaten Bondowoso oleh Bagian Humas

dan PDE serta keterbukaan terhadap informasi yang peneliti rasakan. Hal ini sejalan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas RKA.

C. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel evaluasi anggaran terhadap variabel kinerja aparatur Pemda, ini berarti bahwa semakin tinggi evaluasi yang diterima aparatur Pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja aparatur Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya jika evaluasi anggaran yang sedikit akan melemahkan kinerja aparatur Pemerintah daerah juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis **H3** dalam penelitian ini diterima yaitu evaluasi anggaran terhadap berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Munawar (2006), yang menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kab. Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut atau evaluasi terhadap anggaran yang telah dibuat oleh aparatur pemerintah daerah adalah penting, sehingga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Secara aplikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memenuhi prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan pengkukuran kinerja sektor publik. Pemerintah Daerah menempatkan kalimat yang memberikan pemahaman tentang perbaikan

kinerja dan evaluasi berkala dari setiap program/rencana kerja anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini sejalan dengan aspek kinerja akuntansi sektor publik dengan prinsip 3E yaitu *Economy*, *Effeciency* dan *Effectiveness*.

D. Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja aparatur Pemda, ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima aparatur Pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja aparatur Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit akan melemahkan kinerja aparatur Pemerintah daerah juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis **H4** dalam penelitian ini diterima yaitu umpan balik anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawar (2009). Dalam penelitiannya, diperoleh hasil bahwa Umpan Balik anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintahan Daerah.

E. Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil temuan kelima dalam penelitian ini adalah kesulitan pencapaian tujuan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparatur Pemda.

Dengan demikian hipotesis **H5** dalam penelitian ini diterima yaitu kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung Hirst dan Lowy (1990) dalam Istiyani (2009) yang membuktikan bahwa tujuan yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika menetapkan tujuan spesifik yang sedang atau mudah, maupun tujuan yang bersifat umum. Hasil ini sekaligus mendukung berbagai penelitian yang mengindikasikan bahwa kesulitan tujuan anggaran dan kinerja berhubungan erat. Hal ini sejalan dengan tujuan kinerja sektor publik yang mengedepan *Input*, *Proses*, *Input*, dan *Outcome* dari setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan.

4.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2008.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2008.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2009.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 – 2013.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2009.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2010.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2010.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012.
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2009.
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2009.
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009.
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009.
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2010.
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2010.

28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011.
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011.
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012.
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 - 2012 disusun berdasarkan basis kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan mengefektifkan fungsi pengawasan agar berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komposisi APBD terdiri dari 3 komponen, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain - Lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Komponen Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung memuat belanja yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendukung kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

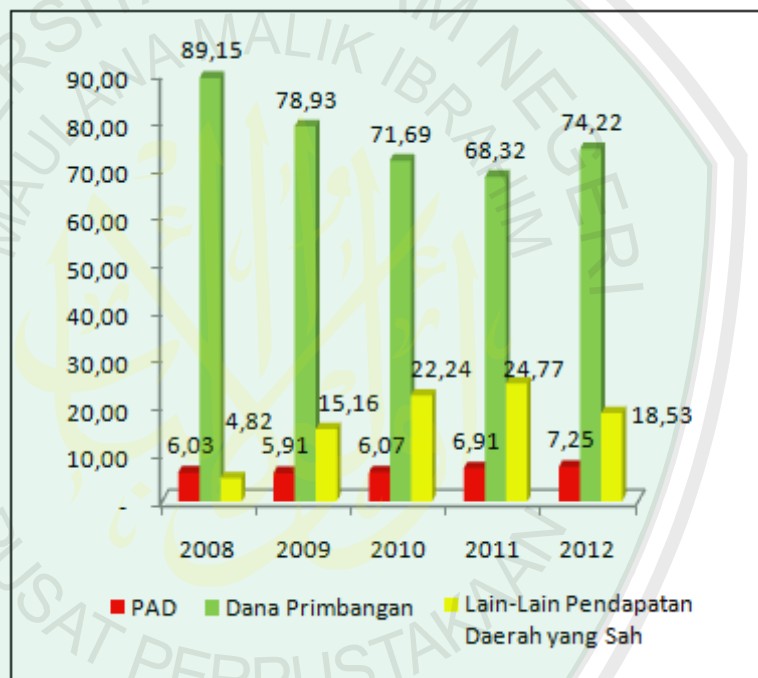
Otonomi daerah secara luas memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu mengupayakan kemandirian dalam penerimaan dan pengelolaan pendapatan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada.

Anggaran pendapatan daerah disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur antara jumlah sumber pendapatan yang diperoleh dengan jumlah belanja yang dikeluarkan. Pendapatan Daerah setiap tahun diupayakan terus meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kondisi Pendapatan daerah hingga saat ini masih bertumpu kepada sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Besaran kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih diatas 65% sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

GAMBAR 4.1

Persentase Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa komponen dana perimbangan sangat mempengaruhi pendapatan daerah, disusul berikutnya lain – lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan PAD relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah, tetapi setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.

1. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

a). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen pendapatan yang memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD selama periode 2008-2012 masih rendah dengan rata-rata proporsi dibawah 10% dari total pendapatan daerah. Peningkatan potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan regulasi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan beban pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselaraskan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut :

- 1). Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak khususnya PBB.
- 2). Pengawasan Obyek Pajak, pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidental (pagelaran musik, pertandingan olah raga dan lain-lain).
- 3). Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian permasalahan data obyek dan subyek wajib pajak.
- 4). Penetapan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/ tunggakan pajak yang terhutang.
- 5). Penyuluhan/ Sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak.
- 6). Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- 7). Peningkatan SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pemungut.
- 8). Peningkatan pemungutan PBB melalui kegiatan pemberian insentif pengembalian dana PBB dan penghargaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pemungutan PBB.
- 9). Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah/ memperlancar pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- 10). Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah.
- 11). Pemutakhiran peraturan daerah yang berhubungan dengan PAD.

b). Peningkatan Dana Perimbangan

Dana perimbangan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen terpenting dari sumber pendapatan daerah karena kontribusinya sangat besar sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sumber pendapatan dari DAU setiap tahun mengalami peningkatan, penentuannya dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan data kebutuhan dan kapasitas daerah, sedangkan DAK dapat diupayakan melalui pengusulan program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional kepada pemerintah pusat agar mendapatkan pendanaannya. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari APBN adalah dana transfer pemerintah pusat kepada daerah termasuk sumber pendapatan yang relatif sulit ditentukan karena sangat bergantung pada potensi daerah penghasil terutama

potensi penerimaan pajak dan sumber daya alam sedangkan kondisi Kabupaten Bondowoso saat ini belum maksimal terhadap dua sektor ini. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilakukan berupa pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.

c). Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber pendapatan yang relatif sulit diukur pencapaiannya karena sifatnya insidental dan bergantung kepada pemerintah pusat terutama dana hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan untuk perolehan pendapatan dari pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah lain lebih dapat diupayakan melalui usulan program pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas pembangunan pemerintah provinsi melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu untuk perolehan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dapat dilakukan dengan upaya memacu perekonomian masyarakat dengan harapan peningkatan aktivitas ekonomi berkorelasi dengan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil khususnya sektor pajak serta aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah dilakukan berupa melaksanakan koordinasi daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan perolehan Dana Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2008-2012, sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 4.18

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2008	575.382.795.279,99	586.839.725.157,00	101,99	11.456.929.877,01
2009	663.382.958.404,62	678.711.928.046,10	102,31	15.328.969.641,48
2010	787.577.483.000,00	818.542.099.884,39	103,93	30.964.616.884,39
2011	945.583.204.323,00	966.956.040.944,09	102,26	21.372.836.621,09
2012	1.047.175.047.000,00	1.073.390.149.430,73	102,50	26.215.102.430,73

Realisasi pendapatan daerah setiap tahun selalu melampaui target yang direncanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Target pendapatan tahun 2008 sebesar Rp.575.382.795.279,99 dan terealisasi sebesar Rp.586.839.725.157,- terjadi pelampauan target sebesar Rp.11.456.929.877,01 atau mengalami peningkatan pendapatan 1,99% dari target yang direncanakan.
- b. Target pendapatan tahun 2009 sebesar Rp.663.382.958.404,62 dan terealisasi sebesar Rp.678.711.928.046,10 terjadi pelampauan target sebesar Rp.15.328.969.641,48 atau mengalami peningkatan pendapatan 2,31% dari target yang direncanakan.

- c. Target pendapatan tahun 2010 sebesar Rp.787.577.483.000,- dan terealisasi sebesar Rp.818.542.099.884,39 terjadi pelampauan target sebesar Rp.30.964.616.884,39 atau mengalami peningkatan pendapatan 3,93% dari target yang direncanakan.
- d. Target pendapatan tahun 2011 sebesar Rp.945.583.204.323,- dan terealisasi sebesar Rp.966.956.040.944,09 terjadi pelampauan target sebesar Rp.21.372.836.621,09 atau mengalami peningkatan pendapatan 2,26% dari target yang direncanakan.
- e. Target pendapatan tahun 2012 sebesar Rp.1.047.175.047.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.073.390.149.430,73 terjadi pelampauan target sebesar Rp.26.215.102.430,73 atau mengalami peningkatan pendapatan 2,50% dari target yang direncanakan.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) mengalami peningkatan sebesar 82,91% dari Rp.586.839.725.157,00 pada tahun 2008 menjadi Rp.1.073.390.149.430,73 pada tahun 2012 dengan rata-rata kenaikan pendapatan sebesar 16,58% per tahun.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2012 mencapai Rp.1.073.390.149.430,73, jauh melebihi target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2009-2013. Pendapatan daerah dalam RPJMD diestimasi akan mencapai Rp.664.411.691.672,- pada tahun 2012 sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2012 terealisasi sebesar 157,61% dari target RPJMD.

PAD sebagai bagian dari komponen pendapatan daerah walaupun hanya memiliki tingkat kontribusi berkisar antara 5% - 7% terhadap pendapatan daerah tetapi setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.

TABEL 4.19

Target dan Realisasi PAD Tahun 2008 - 2012

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2008	29.995.818.008,12	35.371.877.885,00	117,92	5.376.059.876,88
2009	39.566.376.641,47	40.121.861.293,10	101,40	555.484.651,63
2010	45.781.983.200,00	49.663.941.019,39	108,48	3.881.957.819,39
2011	60.582.172.950,00	66.816.392.275,09	110,29	6.234.219.325,09
2012	68.082.147.300,00	77.846.177.656,73	114,34	9.764.030.356,73

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2008 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.35.371.877.885,- meningkat 120,08% menjadi Rp.77.846.177.656,73 pada tahun 2012, dengan kenaikan rata-rata PAD setiap tahunnya sebesar 24,15%.

3. Solusi dan Permasalahan

Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh selama periode 2008-2012 dapat dicapai dan melampaui target. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam realisasi penerimaan pendapatan daerah terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu jumlah realisasi pendapatannya belum optimal, dikarenakan belum optimalnya pelayanan jasa yang dapat meningkatkan retribusi daerah, penagihan terhadap wajib pajak, kinerja petugas pemungut pajak/ retribusi

belum optimal dan belum terinventarisasinya seluruh aset yang mampu menghasilkan penerimaan daerah. Permasalahan yang muncul lainnya adalah terbatasnya objek pajak yang dapat digali oleh pemerintah daerah dikarenakan objek-objek pajak yang ada sudah dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa yang dikenakan retribusi, penagihan secara maksimal, pemberian insentif/ hadiah, penetapan besarnya pajak sesuai hasil data, penyediaan sarana dan prasarana pemungutan yang memadai, meningkatkan kinerja pemungut pajak dan retribusi, intensifikasi pemungutan pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan yang efektif kepada masyarakat dan aparatur pemungut pajak agar ada pemahaman dari segi ketentuan peraturan yang menjadi dasar pemungutan pendapatan daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah sehingga belanja daerah disusun dengan memperhatikan *output* yang akan dihasilkan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Pengelolaan belanja yang dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip efektivitas bahwa belanja daerah harus dilaksanakan sesuai sasaran dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Prinsip efisien bahwa belanja harus memperhatikan masukan dan keluaran. Prinsip transparansi bahwa alokasi anggaran belanja dilaksanakan secara terbuka dapat diakses, dilaksanakan menurut skala prioritas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas bahwa belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.
- b. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah.
- c. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat
- d. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- e. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dan dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat.

- f. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

2. Target dan Realisasi Belanja

Komponen belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Selama periode tahun 2008-2012 akumulasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp.4.389.266.756.930,06 dan terserap sebesar Rp.4.097.250.317.844,12 atau terealisasi 93,35% dari target. Penyerapan anggaran diatas 90,00% per tahun merupakan realisasi yang optimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Secara terperinci realisasi penyerapan anggaran belanja daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL 4.20

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2008 - 2012

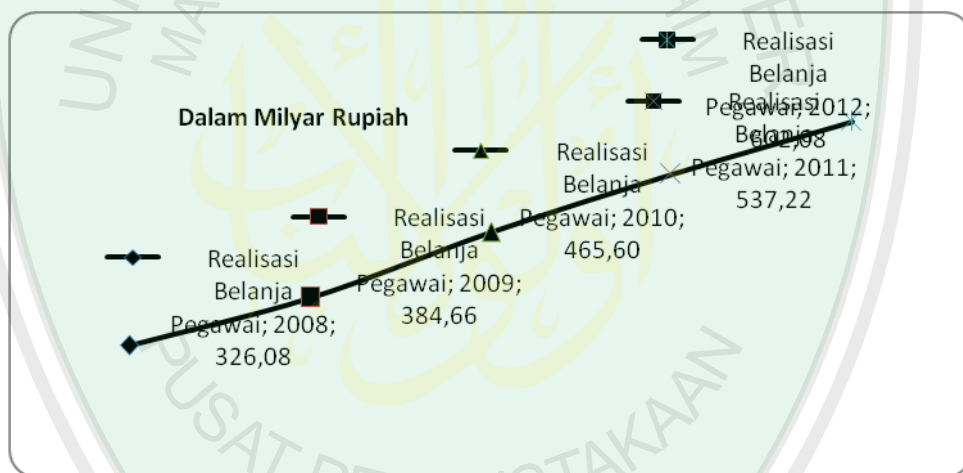
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ Berkurang
2008	667.086.874.976,34	600.953.474.997,44	90,09	-66.133.399.978,90
2009	732.711.883.812,68	705.698.336.447,84	96,31	-27.013.547.364,84
2010	830.993.200.420,68	765.513.977.031,58	92,12	-65.479.223.389,10
2011	1.035.811.127.474,08	950.958.157.445,49	91,81	-84.852.970.028,59
2012	1.122.663.670.246,28	1.074.126.371.921,77	95,68	-48.537.298.324,51

Jumlah	4.389.266.756.930,06	4.097.250.317.844,12	93,35	-292.016.439.085,94
--------	----------------------	----------------------	-------	---------------------

Belanja Pegawai setiap tahun terus meningkat hal ini disebabkan mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertambah cukup signifikan dengan adanya kebijakan mengangkat pegawai honorer daerah menjadi CPNS daerah serta pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.

GAMBAR 4.2

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2008-2012



Grafik diatas menunjukkan anggaran belanja pegawai meningkat setiap tahun, meskipun jumlah pegawai cenderung mulai menurun pada tahun 2011. Naiknya belanja pegawai disebabkan oleh adanya kenaikan gaji. Besarnya porsi Belanja pegawai berpengaruh kepada Belanja Langsung karena anggaran yang tersedia banyak terserap pada pos belanja pegawai.

Belanja Langsung yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan juga cenderung meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 4.21
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 - 2012

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Belanja Langsung
2008	40.972.350.704,00	73.329.777.705,12	88.554.947.513,71	202.857.075.922,83
2009	25.606.552.691,00	120.215.181.821,53	112.005.479.411,00	257.827.213.923,53
2010	21.329.496.995,00	94.887.721.747,27	113.213.796.549,81	229.431.015.292,08
2011	23.226.913.537,00	139.481.715.418,34	169.878.279.817,00	332.586.908.772,34
2012	27.823.173.333,00	159.740.257.944,15	210.599.590.951,00	398.163.022.228,15

Selama periode tahun 2008-2012, Belanja Langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan berkontribusi sekitar 30,00% sampai dengan 38,00% terhadap Belanja Daerah sebagaimana terlihat di tabel berikut ini.

TABEL 4.22
Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Langsung Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Langsung	%
--------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------

2008	600.953.474.997,44	202.857.075.922,83	33,76
2009	705.698.336.447,84	257.827.213.923,53	36,54
2010	765.513.977.031,58	229.431.015.292,08	29,97
2011	950.958.157.445,49	332.586.908.772,34	34,97
2012	1.074.126.371.921,77	398.163.022.228,15	37,07

Estimasi Belanja Daerah menurut RPJMD pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp.664.411.691.672,- sedangkan realisasi Belanja Daerah hingga akhir tahun anggaran 2012 telah mencapai Rp.1.074.126.371.921,77 (161,89%). Belanja Tidak Langsung realisasi penyerapannya mencapai Rp.675.963.349.693,62 atau tercapai 141,33% dari target RPJMD. Belanja Langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan terealisasi Rp.398.163.022.228,15 atau 214,99% dari rencana RPJMD.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penyerapan anggaran Belanja Daerah selama tahun 2008-2012 baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan penyerapan anggaran belanja tidak maksimal diantaranya :

- a. Pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Pegawai masih cukup besar dan terus meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan gaji pegawai dan tunjangan, sehingga berpengaruh kepada besaran alokasi anggaran untuk Belanja Langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan.

- b. Beberapa program/ kegiatan APBD yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur (Bantuan Keuangan) diterima mendekati akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan pelaksanaan program/ kegiatan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang bersifat khusus, terutama pendanaan dari DAK yang mengakibatkan penundaan program/ kegiatan.
- d. Beberapa kegiatan tidak cukup memiliki waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa mengingat kegiatan dilaksanakan pada perubahan APBD.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan – permasalahan yang muncul adalah :

- a. Dalam rangka pelaksanaan penyerapan anggaran yang tepat waktu maka pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaksanakan pengesahan Perda APBD lebih awal agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
- b. Diupayakan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran dan penggunaan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan agar program-program prioritas terus mendapatkan pendanaan.
- c. Efisiensi pos belanja pegawai pada belanja langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya.
- d. Dalam penyusunan anggaran belanja tetap didasarkan pada aspirasi masyarakat agar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

- e. Sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada aparatur sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai peraturan.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Kebijakan pembiayaan daerah muncul karena timbulnya defisit dan surplus tersebut dalam struktur APBD yaitu adanya selisih belanja dengan pendapatan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan mencakup antara lain : (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan (5) Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan antara lain : (1) Pembentukan Dana Cadangan; (2) Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah penganggaran defisit. Penganggaran defisit merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja program dan kegiatan pembangunan pada tahun berjalan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam kebijakan penganggaran defisit ini pemerintah daerah telah melakukan perhitungan secara matang dan cermat untuk menutup defisit anggaran pada tahun berjalan dengan memanfaatkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan masih sangat bergantung kepada SiLPA. Kontribusi SiLPA dalam realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2008-2012, masih diatas 98,00% Sedangkan komponen penyusun penerimaan pembiayaan lainnya dibawah 2,00%.

TABEL 4.23

Persentase Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2012 berdasarkan Realisasi Penerimaan

No	Uraian Komponen Pembiayaan	Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	98,55	99,19	98,35	99,69	99,89
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,45	0,81	1,65	0,31	0,11

Selama kurun waktu 5 tahun realisasi penerimaan pembiayaan bersifat dinamis, kadang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun tergantung dari besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi selain karena efisiensi anggaran belanja dan pelampauan anggaran pendapatan, juga karena di dalam SiLPA terdapat belanja kegiatan yang belum dapat direalisasikan akibat peraturan yang terkait dengan kegiatan tersebut penerbitannya terlambat. Sebagaimana tabel dibawah ini, realisasi penerimaan pembiayaan daerah berfluktuasi. Penerimaan terbesar terjadi di tahun anggaran 2012 sebesar Rp.105.531.870.746,28.

TABEL 4.24

Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2008	96.012.068.129,35	86.491.526.495,86	90,08
2009	70.688.892.539,42	69.186.579.422,42	97,87
2010	44.182.944.220,68	42.634.553.898,27	96,50
2011	95.995.149.951,08	95.186.839.947,68	99,16
2012	105.517.496.646,28	105.531.870.746,28	100,01

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan mencapai Rp.41.638.542.233,- terealisasi sebesar Rp.40.579.660.916,- (97,46%). Pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan pemilukada tahun 2013,

pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah di Bank Jatim dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemberian pinjaman daerah (hanya teralisasi pada tahun 2008).

TABEL 4.25

Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	4.307.988.433,00	3.749.109.116,00	87,03
2009	767.226.800,00	267.226.800,00	34,83
2010	767.226.800,00	767.226.800,00	100,00
2011	5.767.226.800,00	5.767.226.800,00	100,00
2012	30.028.873.400,00	30.028.871.400,00	100,00
Jumlah	41.638.542.233,00	40.579.660.916,00	97,46

3. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum mendapatkan permasalahan yang berarti dalam pembiayaan daerah, karena dalam pembiayaan daerah selama tahun 2008-2012 menggunakan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dan pencapaian kinerja ke depan, perlu diupayakan optimalisasi penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman serta berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.